



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang  
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929  
Website: ntt.kemenag.go.id

---

**PEMBERITAHUAN PERSIAPAN PELAKSANAAN E - PURCHASING**  
**Melalui e-Katalog Sektoral Kementerian Agama RITahun Anggaran 2024**

- Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kemenag Belu
- Uraian Singkat Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji Terpadu (PLHUT sesuai Prototype berupa Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan ME, Pekerjaan Fasad, dan Pekerjaan Akhir
- Sumber Dana : DIPA Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 025.09.2.423154/2024, tanggal 24 Nopember 2023, Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, Kode 025.09.DC.2147.QAH.002.051.A.533111
- Alamat : Jl. Laksamada R. E. Martadinata, Atambua - Belu
- ID RUP : 51385678
- Metode Pelaksanaan : Pekerjaan Konstruksi - e-Purchasing Ekatalog Konstruksi LKPP - Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumsum
- Time Line : 1. Tahap Persiapan Pengadaan (1 April 2024 – 8April 2024) :  
a. Identifikasi kebutuhan etalase produk  
b. Finalisasi dokumen teknis pekerjaan konstruksi  
c. Penetapan Dokumen Persiapan pengadaan
2. Tahap Persiapan e-Purchasing (8 – 18 April 2024) :  
a. Analisis Pasar  
b. Identifikasi Penyedia e – Katalog Sektoral  
c. Evaluasi dan Penetapan Penyedia
3. Tahap Pelaksanaan E - purchasing :  
a. Proses e-purchasing (Memasukkan Produk dalam Keranjang, Buat Paket, Negosiasi) : 18 – 21 April 2024

b. Penandatanganan Kontrak : 23 – 24 April 2024

- Alamat Etalase : <https://e-katalog.lkpp.go.id>  
Etalase Produk Sektoral Kementerian Agama Republik Indonesia  
"Pembangunan atau Renovasi Gedung Keagamaan dan Pendidikan  
Kementerian Agama"
- Kelengkapan : 1. DED Pekerjaan Konstruksi  
2. Daftar Kebutuhan Produk  
3. Spesifikasi Teknis  
4. Dokumen kelengkapan lainnya
- Catatan Penting terkait Pekerjaan Konstruksi : 1. Pagu Anggaran : Rp. 2.079.153.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)  
2. Nilai Total HPS : Rp. 2.031.054.000,00 (dua milyar tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah)  
3. Untuk Kualifikasi Usaha Kecil, tidak ada Sub Kontrak maupun KSO.  
4. Masa Pelaksanaan: 180 hari kalender  
5. Masa Pemeliharaan: 180 hari kalender  
6. Pembayaran Prestasi Pekerjaan :  
a. Dengan uang muka 30 % (Keputusan Kepala LKPP No 117 Tahun 2024)  
b. Termin sesuai progres pekerjaan:  
▪ Termin pertama 15% saat capaian fisik paling sedikit 45%;  
▪ Termin kedua 15% saat capaian fisik paling sedikit 60%;  
▪ Termin ketiga 15% saat capaian fisik paling sedikit 75%;  
▪ Termin keempat 15% saat capaian fisik paling sedikit 90%;  
▪ Termin keempat 10% saat capaian fisik paling sedikit 100%;
- Syarat Kualifikasi : 1. Diperuntukkan bagi pelaku usaha kualifikasi usaha kecil;  
2. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) absah;  
3. Memiliki SBU dan NIB dengan BG002 KBLI 41012 yang masih berlaku; (Verifikasi SIKAP)  
4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;  
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan

- perusahaan (apabila ada perubahan) absah;
6. Memiliki NPWP Badan Usaha, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid, Lunas tahun pajak terakhir 2023 bagi yang sudah Laporan SPT Tahunan 2023, atau tahun pajak 2022 bagi yang belum Laporan SPT Tahunan 2023;
  7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP), untuk usaha kecil SKP=5;
  9. Memiliki rekening koran atas nama perusahaan dan berstatus aktif.